

KINERJA PERPUSTAKAAN DALAM TRANSFORMASI BERBASIS INKLUSI SOSIAL PADA DINAS PERPUSTAKAANDAN KEARSIPAN KABUPATEN ENREKANG

Sudarmin^{*1}, Ahmad Firman², Mukhtar Hamzah³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}bilalnaufal.08@gmail.com, ²ahmadfirman@gmail.com, ³Mukhtarhamzah@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Literat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang. Faktor-faktor kendala dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam upaya mewujudkan masyarakat literat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang, dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk mewujudkan masyarakat literat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang. Penulis melakukan penelitian pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif, metode pengumpulan data menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan bahan melalui sumber baik langsung maupun melalui literatur yang telah ada lalu dilakukan analisis secara mendalam menggunakan metode triangulasi. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara detail data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam upaya mewujudkan masyarakat literat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang melalui beberapa strategi, yaitu melibatkan peran aktif pustakawan, mengeluarkan regulasi kebijakan dan pembentukan tim sinergi, melakukan *Stakeholder Meeting*, launching *Ipustaka Enrekang*, dan melakukan kegiatan *Peer Learning Meeting*. Namun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang juga mengalami beberapa kendala dalam mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial, yaitu keterbatasan anggaran dana, dan jaringan internet. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari tingkat provinsi, kabupaten maupun swasta, serta mengoptimalkan anggaran yang ada seoptimal mungkin.

Kata kunci : strategi, inklusi sosial, perpustakaan umum.

ABSTRACT

This study aims to determine Social Inclusion-Based Library Transformation in Efforts to Create a Literate Society at the Enrekang District Library and Archives Service, the constraints in transforming a social inclusion-based library in an effort to create a literate society at the Enrekang District Library and Archives Service, and the efforts made to overcome obstacles in social inclusion-based library transformation to create a literate society at the Library and Archives Service of Enrekang Regency. The author conducted research at the Enrekang Regency Library and Archives Service using a qualitative method with a descriptive approach, the data collection method used purposive sampling. Data collection techniques using observation, interviews and documentation. The collection of materials through sources both directly and through existing literature is then carried out in-depth analysis using the triangulation method. Descriptive analysis aims to describe in detail the data obtained from various sources to achieve research objectives. The results showed that social inclusion-based library transformation in an effort to create a literate society at the Enrekang Regency Library and Archives Service through several strategies, namely involving the active role of librarians, issuing policy regulations and forming a synergy team, conducting Stakeholder Meetings, launching the Enrekang Ipustaka, and carrying out activities Peer Learning Meetings. However, the Enrekang Regency Library and Archives Service also experienced several obstacles in developing a library based on social inclusion, namely limited budget funds, and internet network. The efforts made to overcome these

obstacles are by collaborating with various parties from the provincial, district and private levels, as well as optimizing the existing budget as optimally as possible.

Keywords: *strategy, social inclusion, public libraries.*

PENDAHULUAN

Perpustakaan adalah sebuah ruangan, bagian sebuah gedung, ataupun gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku dan terbitan lainnya yang biasa disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan untuk dijual atau suatu unit kerja yang substansinya merupakan sumber informasi yang setiap saat dapat digunakan oleh pengguna jasa layanan (Wiji Suwarno, 2014). Ada beberapa jenis perpustakaan salah satunya yaitu perpustakaan umum.

Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial (Undang-Undang No. 43 Tahun 2007).

Perpustakaan dahulu hanya dikenal sebagai gedung usang yang dipenuhi banyak buku dan membosankan, namun eksistensi perpustakaan dewasa ini sangat banyak dibicarakan semata hanya untuk melengkapi hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan saja. Tidak hanya itu banyak rintangan yang harus dilalui perpustakaan untuk bisa berada di titik ini. Titik di mana perpustakaan tidak lagi dilihat sebelah mata, perpustakaan bukan sekadar gedung yang menyimpan buku, serta perpustakaan bukan lagi tempat yang membosankan untuk dikunjungi. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sekali perpustakaan, bahkan jangkauannya pun hingga ke pelosok negeri.

Perpustakaan umum biasanya berdiri untuk melayani masyarakat dalam lingkup tertentu, umumnya tingkat kota dan provinsi. Perpustakaan umum daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai pusat deposit daerah, pusat penelitian daerah, dan memberikan layanan informasi, pendidikan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas. Sehingga sudah sewajarnya Perpustakaan memastikan layanannya mencakup seluruh masyarakat kota atau provinsi tersebut. Siapapun dia, apapun latar belakang sosialnya (Usman Noor, 2019).

Dalam kehidupan sosial bermasyarakat salah satu masalah yang timbul adalah adanya golongan masyarakat yang tereksklusi. Masyarakat yang tereksklusi atau pemisahan golongan umumnya terjadi karena disebabkan oleh perbedaan atau kondisi yang dialaminya. Sebagai contoh karena perbedaan warna kulit, suku, ras, agama, atau status sosial yang direpresentasikan dalam bentuk apakah dia kaya atau miskin, menjadikan suatu golongan menjadi tereksklusi. Sehingga muncul golongan di masyarakat yang tereksklusi atau berusaha dimarginalkan dan tidak dianggap dalam masyarakat (Usman Noor, 2019).

Fenomena yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pengunjung perpustakaan umum di Kabupaten Enrekang lebih didominasi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, sementara Perpustakaan juga mendorong seluruh kalangan masyarakat untuk dapat memanfaatkan layanan perpustakaan. Karena itulah perpustakaan bertransformasi menjadi ruang yang tidak lagi sekedar sebagai tempat meminjam dan membaca koleksi buku, namun juga memfasilitasi masyarakat dengan kegiatan yang meningkatkan literasi masyarakat. Adanya kegiatan pelibatan masyarakat di dalam Perpustakaan juga akan meningkatkan angka kunjungan dan kebermanfaatan perpustakaan bagi Masyarakat.

Dalam program perpustakaan berbasis inklusi sosial tersebut, hendaknya perpustakaan dibuat lebih nyaman, diberi koneksi internet cepat, dan disediakan koleksi

buku-buku yang tepat guna. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa transformasi perpustakaan telah berhasil mengubah wajah perpustakaan yang selama ini terkesan “pasif”. Perpustakaan merupakan tempat untuk menyimpan dan melestarikan sumber pengetahuan juga dijadikan sebagai tempat aktifitas membaca oleh masyarakat yang dapat diakses dengan gratis. Dengan penguasaan pengetahuan akan terbentuk suatu fondasi masyarakat berpengetahuan atau knowledge society. Penguasaan pengetahuan akan berguna untuk mendorong adanya perubahan pada masyarakat untuk menuju kehidupan yang lebih maju dan sejahtera, dengan penguasaan pengetahuan masyarakat dapat meningkatkan kualitas kehidupan menjadi lebih baik dan sejahtera. Akan tetapi dengan adanya perkembangan dan kemajuan zaman, terutama dibidang teknologi komunikasi dan informasi, masyarakat dapat mengakses pengetahuan dan informasi melalui media lain tanpa harus datang ke perpustakaan. Untuk itulah perpustakaan umum sekarang ini dituntut untuk melakukan transformasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat agar tetap mampu mempertahankan eksistensinya dan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dengan tujuan dapat dijadikan sebagai sarana atau wadah bagi masyarakat untuk berkegiatan dan belajar sepanjang hayat sehingga masyarakat yang datang ke perpustakaan dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya (Rani, 2019).

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga tidak hanya untuk mempertahankan eksistensi suatu perpustakaan saja, akan tetapi juga merupakan salah satu bentuk dukungan yang dilakukan oleh perpustakaan untuk mendukung Program Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG's). Sebagaimana seruan dari IFLA (International Federation Library Association) yang meminta kepada semua pihak untuk menjadikan perpustakaan di setiap bagian dunia menjadi mitra dalam rencana pembangunan nasional dan daerah di setiap negara serta mendorong agar perpustakaan masuk dalam rencana pembangunan nasional untuk SDGs. Adanya seruan dari IFLA di atas menjadikan perpustakaan memegang peranan penting untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan akses layanan informasi, sebagai pusat belajar dan berkegiatan masyarakat (Rani, 2019).

Perpustakaan memiliki peran yang begitu penting dalam penyebaran informasi hal ini dikarenakan didalam sebuah perpustakaan terdapat banyak sekali buku dan disetiap bukunya itu memiliki beragam informasi yang sangat berguna bagi pembacanya. Karena dianggap sebagai sumber informasi maka perpustakaan juga sangat berperan dalam menciptakan masyarakat yang literet, yaitu masyarakat yang literet akan informasi (Darmayanti, 2016).

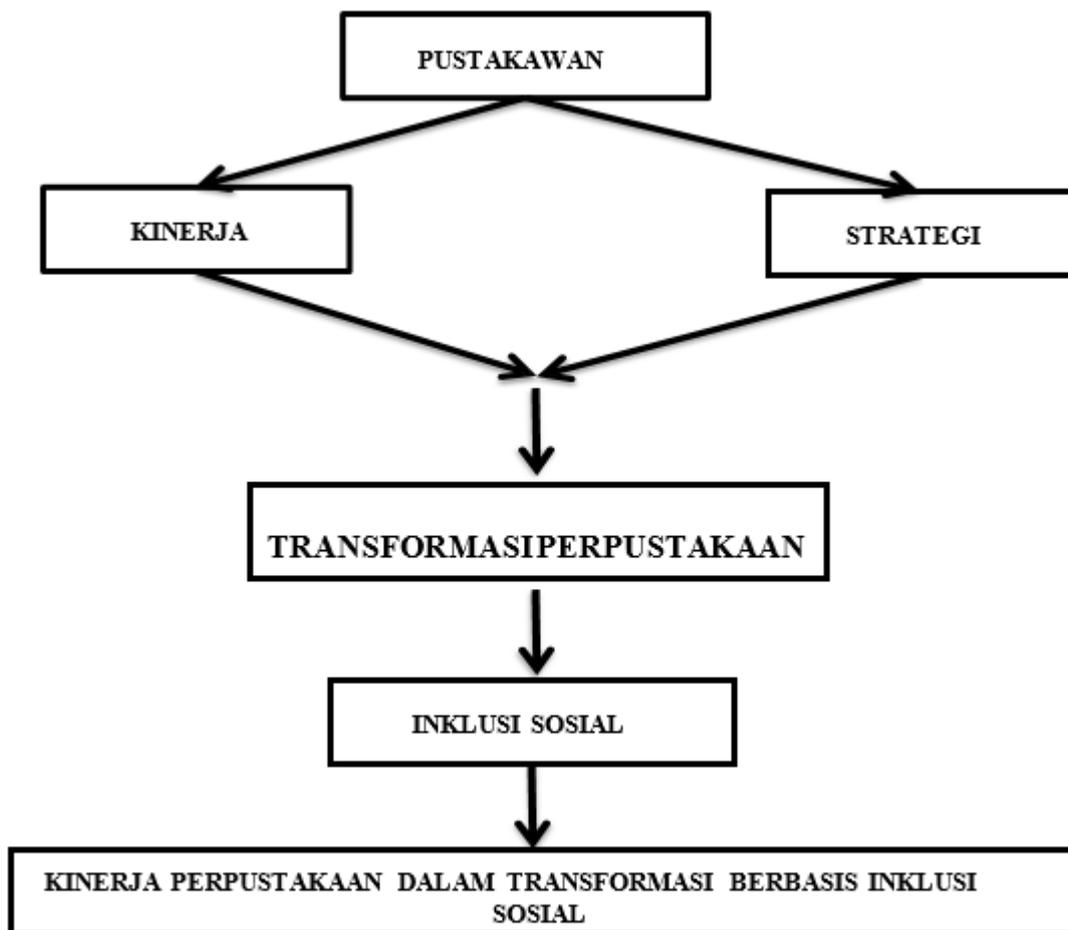
Perpustakaan diharapkan tidak hanya sebagai tempat membaca berbagai jenis buku, namun mampu menjadikan masyarakat sebagai penumbuh dan pegiat literasi yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Literasi informasi atau melek informasi merupakan kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif, untuk memenuhi kebutuhan pemustaka akan informasi yang dibutuhkan (Purnomo, 2018).

Dengan timbulnya kesadaran literasi informasi pada masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas perekonomian dengan bermunculannya lapangan usaha. Penyediaan buku-buku yang sesuai dengan lapangan pekerjaan masyarakat akan merangsang pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat yang ingin berkembang bersaing dalam dunia usaha (Purnomo, 2018). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia secara serius melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

dan Perpustakaan Nasional RI telah menetapkan program ini serta menjadikan perpustakaan sebagai salah satu program prioritas nasional percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Hal ini didasari oleh perpustakaan yang dianggap mampu menjadi wadah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tersedianya akses informasi dari buku dan internet yang dimiliki oleh perpustakaan, tersedianya ruang belajar dan berkegiatan masyarakat, serta adanya pendampingan yang diberikan oleh pustakawan, sehingga mampu mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera (Rani 2019). Pada tahun 2018 terdapat 21 provinsi yang mendapat bantuan dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, salah satunya Kabupaten Enrekang saat ini terdapat 33 Perpustades/Kel/TBM Mitra Program yang ada di Enrekang.

Berdasar pada uraian diatas maka penelitian ini disusun melalui konsep kerangka pemikiran yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian



Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana kinerja pustakawan dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang ?
2. Apa saja kendala transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang?

3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam mengatasi kendala tersebut ?

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. (Singarimbun, 2017). Penelitian ini dilakukan di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang. Waktu penelitian dilakukan mulai Oktober s/d November 2022. Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Dalam keseluruhan penelitian yang menjadi subjek penelitian adalah Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya dan Pengembangan Budaya Baca, Kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dan Pustakawan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang yang telah direkomendasikan.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan “Purposive Sampling” yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut paling tahu tentang apa yang diharapkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Kinerja Pustakawan Dalam Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Enrekang

Strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang merupakan perpustakaan umum yang ada di Kabupaten Enrekang. Sebagai Perpustakaan sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman. Saat ini Perpustakaan sedang menggalakkan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dilakukan dengan beberapa strategi yaitu:

A. Peran Aktif Pustakawan

Pustakawan adalah salah satu profesi yang dapat mempengaruhi masa depan bangsa. Pustakawan bertugas untuk membimbing dan mengajarkan pemustaka dalam hal mencari bahan bacaan yang sedang dibutuhkan, termasuk membimbing pemustaka agar bisa lebih baik dalam memilih buku. Bahkan juga bukan hanya untuk mendapatkan buku yang dibutuhkan tetapi untuk memperoleh subyek lain yang ada korelasi buku dengan buku yang dibutuhkan.

Berikut hasil Wawancara dengan salah satu pustakawan Ahli Madya di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang, beliau menuturkan:

“Pustakawan harus ikut terlibat dan harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, untuk membangun layanan yang berbasis inklusi sosial, maka pustakawan harus memiliki atau menguasai informasi dan teknologi untuk membantu orang dipedesaan yang kurang gemar dalam membaca buku. Peran pustakawan sangat strategis karena pustakawan sebagai ujung tombak dari pelayanan masyarakat.. (Wawancara dengan salah satu pustakawan Ahli Madya di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang, Pada Senin, 21 November 2022).

Senada pula dengan keterangan seorang Pustakawan Muda di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang, beliau menuturkan:

“Dalam transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial pustakawan harus ikut terlibat. Pustakawan berperan sebagai fasilitator. (Wawancara dengan salah satu

pustakawan Ahli Muda di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang. Pada Rabu, 23 November 2022).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pustkawan Ahli Madya, beliau menuturkan:

“Pustakawan diminta peran aktifnya dalam meningkatkan kegemaran membaca masyarakat, meningkatkan keterampilan masyarakat dan turut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keterampilan masyarakat diperoleh dari kegemaran membaca. Sehingga dari hasil keterampilan yang menghasilkan, dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. (Wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pembinaan, Tranformasi Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca. Pada Rabu, 23 November 2022)

Dari hasil wawancara dengan para informan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini melibatkan peran pustakawan didalamnya. Pustakawan harus berperan aktif dalam meningkatkan minat baca masyarakat, karena tujuan diadakannya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari membaca.

B. Mengeluarkan Regulasi Kebijakan dan Pembentukan Tim Sinergi

Regulasi kebijakan merupakan instrumen penting dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan serta Tranformasi perpustakaan. Transformasi perpustakaan harus mencapai berbagai aspek perpustakaan, baik teknis dalam penyelenggaraan perpustakaan maupun regulasi perpustakaan itu sendiri.

Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Perpustakaan dan Minat Baca:

“Regulasi kebijakan dibuat untuk memperjelas program transpormasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ke kabupaten dan desa. Regulasi kebijakan ini bisa berubah tergantung kebutuhan, setelah dilakukannya implementasi dan jika dirasakan ada kalimat yang harus ditambah ataupun dirubah dalam regulasi. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Perpustakaan & Minat Baca, Pada Rabu, 23 November 2022)

Tujuan di buatnya regulasi/peraturan daerah kebijakan tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu untuk memperjelas program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Tim sinergi provinsi merupakan tim lintas sektor dari berbagai pemangku kepentingan yang berkedudukan di pemerintahan tingkat provinsi. Tim sinergi provinsi adalah salah satu komponen pendukung transformasi perpustakaan yang sangat penting. Secara umum peranan tim sinergi provinsi adalah sebagai motor penggerak keberlanjutan dan Tranformasi program revitalisasi perpustakaan umum melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Berikut penuturan dari Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Perpustakaan & Minat Baca mengenai Tim Sinergi:

“Untuk keanggotaan tim sinergi, Kabupaten Enrekang memiliki 13 anggota. Terbentuknya tim sinergi provinsi merupakan suatu langkah awal untuk mendukung berjalannya ekosistem pendukung keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah melalui transformasi perpustakaan.” (Wawancara dengan Pustakawan Ahli Muda, Pada Rabu, 23 November 2022).

Berikut tanggapan dari Kepala Bidang Pengembangan Minat Baca dan

Kearsipan Kabupaten Enrekang:

“Tim sinergi ini gunanya untuk mengsinergikan program transformasi yang sudah di berikan oleh pusat. Untuk mengetahui apakah kegiatan transformasi itu berjalan atau tidak. Jika tidak berjalan maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang wajib mencari tahu apa yang menjadi kendalanya. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Perpustakaan & Minat Baca., Pada Selasa, 22 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas dapat diketahui bahwa pembuatan tim sinergi Provinsi merupakan salah satu strategi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam mengembangkan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial, tim sinergi ini gunanya untuk mengsinergikan program transformasi yang sudah di berikan oleh pusat dan untuk mengetahui apakah kegiatan transformasi itu berjalan atau tidak.

C. Pertemuan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Meeting*)

Stakeholder Meeting transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini merupakan kegiatan mempertemukan para stakeholder baik di tingkat provinsi, kabupaten dan pihak swasta lainnya dengan misi literasi untuk kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari pelaksanaan Stakeholder Meeting ini adalah untuk membangun kesadaran tentang pentingnya Transformasi perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu untuk membangun dukungan dan komitmen dari Stakeholder untuk Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Juga untuk menyusun rencana sinergi yang berkelanjutan antar stakeholder untuk mendukung Transformasi berkelanjutan. Kegiatan ini dilakukan untuk mencari dukungan atau sponsor dari para stakeholder.

Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai stakeholder diantaranya, Komunitas / TBM, Desa/Kelurahan, Perguruan Tinggi , Dinas P3AP Kabupaten Enrekang, Dinas Kominfo Kabupaten Enrekang, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Enrekang, Tim penggerak PKK Kabupaten Enrekang, Tim sinergi provinsi, Unsur Perguruan tinggi, media massa, lembaga non pemerintah, Dinas perpustakaan kabupaten/kota, perwakilan pengelola perpustakaan desa dan kepala desa penerima manfaat program serta perwakilan inapact/ dampak (orang yang berubah hidupnya karena mendapatkan manfaat dari layanan perpustakaan).

Wawancara dengan Pustakawan Ahli Muda:

“Kegiatan Stakeholder Meeting ini dilakukan 1 sampai 2 kali dalam setahun sesuai dengan anggaran yang ada, tujuan diadakannya kegiatan stakeholder Meeting ini yaitu untuk menyamakan persepsi antar stakeholder untuk mendukung kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Selain untuk menyamakan persepsi program juga bertujuan untuk mendapatkan dukungan. (Wawancara dengan Pustakawan Muda, Pada Rabu, 23 November 2022)

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang menuturkan Bahwa :

“Perpustakaan sebagai tempat untuk membaca harus bertransformasi menjadi tempat yang menumbuhkan nilai ekonomi, menjadi pusat pengetahuan, sentral informasi dan kreativitas masyarakat. Stakeholder Meeting ini diadakan dengan tujuan terciptanya persamaan persepsi antar para stakeholder, dan juga bentuk dukungan yang diberikan oleh pihak- pihak terkait dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. (Wawancara dengan Kepala Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang, Pada Selasa, 22 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diatas dapat diketahui bahwa kegiatan Stakeholder Meeting ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyamakan persepsi antar stakholder dan untuk mendapatkan dukungan atau lebih tepatnya sponsor serta dapat menjalin kerjasama untuk mengembangkan program kedepannya.

D. Melaunching Aplikasi ePerpus Enrekang Library Digital

Teknologi informasi telah menjadi fasilitas pendukung yang sangat penting bagi berbagai sektor kehidupan dan memberikan pengaruh besar bagi perubahan- perubahan yang mendasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, dan penelitian. Untuk meningkatkan minat baca Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang Provinsi melakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melaksanakan perpustakaan berbasis digital.

Berikut Paparan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang mengenai ePerpus Enrekang:

“ePerpus Enrekang di launching pada bulan Nopember 2018 bertepatan dengan hari kunjung perpustakaan nasional. Aplikasi ePerpus Enrekang ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pemustaka dalam mencari informasi, dengan adanya aplikasi ini diharapkan agar minat baca masyarakat meningkat, karena dengan membaca masyarakat bisa mengembangkan bahan bacaannya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. (Wawancara dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang, Pada Selasa, 22 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diatas, dapat diketahui bahwa Eperpus Enrekang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan mengikuti perkembangan zaman, selain itu Eperpus Enrekang ini juga menjadi salah satu strategi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan TIK.

Eperpus Enrekang diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat Enrekang tanpa harus datang ke perpustakaan. Untuk dapat mengakses dan menggunakan ePerpus Enrekang secara utuh maka pemustaka harus mendaftar terlebih dahulu. Pendaftaran tidak mengharuskan atau dilakukan verifikasi tertentu, sehingga masyarakat yang tidak memiliki KTP Enrekang pun tetap bisa mengakses ePerpus Enrekang. Keuntungan menjadi anggota ePerpus Enrekang antara lain dapat meminjam koleksi yang ada di aplikasi ePerpus Enrekang. Peminjaman buku melalui Eperpus dilakukan secara mandiri dan otomatis melalui menu collection. Anggota bisa meminjam buku maksimal 2 judul dalam satu waktu, dengan durasi peminjaman selama 1 minggu. Setelah 1 minggu maka secara otomatis buku yang kita pinjam tidak dapat diakses, kecuali kita meminjamnya kembali.

Mengembangkan layanan perpustakaan berbasis online melalui aplikasi sebenarnya jika dipandang dari sisi ekonomis juga lebih menguntungkan. Biaya Transformasi aplikasi memang membutuhkan dana besar namun jika dipandang dari sudut investasi akan menjadi lebih murah, karena biaya tersebut hanya dikeluarkan besar ketika awal. Sedangkan untuk operasional jauh lebih murah dari biaya Transformasinya.

Hal ini sesuai dengan teori tentang tujuan kebijakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu meningkatkan literasi informasi berbasis TIK. Di era digital saat ini perpustakaan digital sangatlah mendukung transformasi perpustakaan berbasis

inklusi sosial. Dengan adanya perkembangan dalam dunia digital saat ini makaperpustakaan tidak lagi hanya sekedar tempat sekumpulan buku-buku yang diijarkan, lebih dari itu perpustakaan saat ini dituntut untuk menyediakan juga koleksi koleksinya dalam bentuk digital, mengelola dan memberikan layanan umum dan bersamaan ke masyarakat. Sehingga penyebaran ilmu pengetahuan akan semakin merata dan dapat mengesjahterakan masyarakat. Dimana perkembangan perpustakaan harus mengikuti perkembangan Teknologi, informasi dan komunikasi. Praktik pengelolaan perpustakaan yang semula dilakukan secara konvensional kini sudah beralih ke bentuk digital.

E. Peer Learning Meeting

Pelaksanaan Peer Learning Meeting ini bertujuan untuk memfasilitasi proses saling belajar dan berbagi pengalaman antar perpustakaan. Serta memotivasi dan membangun kepercayaan diri peserta untuk terus melaksanakan rencana kerja transformasi perpustakaan kabupaten maupun desa, memperkuat proses mentoring dan monitoring perpustakaan.

Wawancara dengan Pustakawan Ahli Muda Membaca beliau mengatakan bahwa: “Tujuannya untuk belajar bersama, yang diundang dalam PLM ini yaitu dari kepala desa, tenaga pengelola dan infek, yaitu orang yang memang merasakan langsung dampak dari kegiatan ini. Dalam hal pelibatan masyarakat Perpustakaan ini melakukan pelatihan yang dilakukan di perpustakaan Desa dengan sumbernya yaitu buku-buku di perpustakaan contohnya seperti pelatihan cara beternak ayam bangkok.

(Wawancara dengan Pustakawan Ahli Muda., Pada Rabu, 23 November 2022)

Berikut keterangan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang:

“Tujuan di adakannya kegiatan Peer Learning Meeting ini yaitu untuk belajar bersama. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa mendorong terciptanya inovasi dan kreatifitas yang positif dan produktif sehingga bisa memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan sumber daya manusia.” (Wawancara dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang, Pada Selasa, 22 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan diadakannya kegiatan Peer Learning Meeting ini adalah untuk belajar bersama, bertukar pengalaman antar perpustakaan, memotivasi dan membangun kepercayaan diri untuk melaksanakan rencana kerja transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Perpustakaan harus lebih proaktif memfasilitasi hal-hal yang dibutuhkan masyarakat, menjadi pusat sumber informasi dan pusat berkegiatan masyarakat yang saling terkoneksi, berbagi pengetahuan, pengalaman, dan belajar berbagai keterampilan, serta saling belajar dalam mendorong kesempatan berinovasi, berkreasi dan produktif. Melalui Peer Learning Meeting, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial diharapkan dapat mempercepat terwujudnya masyarakat literet yang sejahtera, dan memiliki daya saing tinggi.

Jika dihubungkan temuan dengan teori maka dapat diperoleh hasil bahwa kegiatan Peer Learning Meeting dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya, Hal ini dapat diperoleh dari infect yang dirasakan oleh orang-orang yang mau bertransformasi dan menjadikan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat. Bila

masyarakat sudah menyadari dan merasakan secara langsung manfaat layanan perpustakaan bagi kehidupannya, maka dengan sendirinya tingkat kegemaran membaca akan meningkat dan menjadikannya masyarakat yang literet. Dari hasil pembahasan diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa Strategi yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam Mengembangkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial yaitu Peran Aktif Pustakawan, Menetapkan Regulasi Kebijakan dan penetapan Tim Sinergi, Melakukan Pertemuan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Meeting), Launcing ePustaka Enrekang Library Digital dan melakukan kegiatan PeerLearning Meeting. Hal ini dilakukan agar program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat berkembang dan berdampak positif di masyarakat.

Kendala Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Literet Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Enrekang:

A. Keterbatasan Anggaran Dana

Anggaran dana merupakan sebuah hal yang perlu disiapkan dalam sebuah organisasi atau institusi agar dapat menampung kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Perpustakaan merupakan lembaga yang tumbuh dan berkembang baik dalam arti koleksi, jasa maupun manusianya. Setiap perpustakaan tentunya memerlukan anggaran yang besar untuk membiayai semua keperluan operasional, staf serta penambahan koleksi perpustakaan.

Berikut penuturan dari Pustakawan Ahli Madya:

“Faktor kendala yang dihadapi disini seperti Anggaran, Sebagai VIC atau penanggung jawab program, ketika terjadi kendala di desa maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan harus melakukan mentoring atau pendampingan ke desa. Anggaran adalah unsur utama untuk menjalankan perpustakaan, tanpa anggaran perpustakaan tidak mungkin dapat dikelola dan dioperasikan dengan sempurna, meskipun sistemnya bagus dan pustakawannya bermutu. Pada tahun 2018 akhir semua difasilitasi oleh pusat sehingga Dinas Perpustakaan tidak bisa melakukan kegiatan karena anggaran sudah berjalan. Di tahun 2019 Dinas Perpustakaan tidak bisa melakukan refleksi karena anggaran sudah ditentukan dari pusat sehingga hanya bisa memanfaatkan anggaran yang ada dan maksimalkan untuk Tranformasi program” (Wawancara dengan Pustakawan Ahli Madya. Pada Rabu, 23 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas, dapat diketahui bahwa anggaran dana merupakan suatu hal yang sangat penting dalam Tranformasi perpustakaan. Karena Setiap perpustakaan tentunya memerlukan anggaran yang besar untuk membiayai semua keperluan operasional, staf serta penambahan koleksi perpustakaan.

B. Jaringan internet

Sebelum menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial para pihak terkait harus berkomitmen untuk menyediakan jaringan internet, hal ini dilakukan untuk mempermudah pihak yang terkait melaporkan kegiatannya secara online kepada Perpustakaan Nasional.

Adapun implementasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini telah dilakukan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang sejak tahun 2019. Terdapat 5 kabupaten dan 20 desa/kelurahan yang sudah mengimplementasikan

transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu:

- 1) Kecamatan Enrekang
 - a) Desa Cemba
 - b) Desa Leoran
 - c) Kel. Pinang
 - d) Kel Batili
- 2) Kecamatan Anggeraja
 - a) Desa Saludewata
 - b) Desa Bambapuung
- 3) Kecamatan Alla
 - a) Desa Mata Allo
 - b) Kel. Kalosi
 - c) Desa Bolang
 - d) Desa Taulo
 - e) Desa Pana
 - f) Kel Buntu Sugi
 - g) Desa Sumillan
- 4) Kecamatan Masalle
 - a) Desa Masalle
 - b) Desa Buntu Sarong
 - c) Desa Buntu Tangla
 - d) Desa Batu Ke'de
- 5) Kecamatan Baraka
 - a) Desa Banti
 - b) Kel. Baraka
 - c) Desa Lemo

Masing-masing dari kabupaten dan desa tersebut telah merasakan impact dari kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Disamping itu terdapat pula beberapa kendala dilapangan seperti kapasitas jaringan internet yang lambat sehingga menyebabkan kendala dalam hal pelaporan dokumentasi kegiatan di desa untuk dilaporkan ke pusat.

Berikut Penuturan dari Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya & Minat Baca:

“Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini mengharuskan setiap anggotanya untuk berkomitmen menyediakan jaringan internet. Dalam hal ini seluruh desa yang akan bertransformasi harus membuat tower. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang juga melakukan sosialisasi dan mentoring ke desa binaan dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. (Wawancara dengan Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Perpustakaan & Minat Baca, Pada Rabu, 23 November 2022).

Berdasarkan penuturan dari informan diatas dapat diketahui bahwa jaringan internet merupakan salah satu syarat dalam penetapan perpustakaan desa yang bertransformasi menjadi perpustakaan yang berbasis inklusi sosial, tujuannya yaitu untuk memudahkan pelaporan kegiatan perpustakaan ke pusat.

Dari hasil penuturan diatas dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kendala yang di hadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam mengembangkan perpustakaan berbasis anggaran dana dan jaringan internet. Hal ini disebabkan karena anggaran dana sudah ditentukan oleh pusat sehingga hanya bisa

memanfaatkan anggaran yang ada. Jaringan internet ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang lebih luas lagi serta untuk memudahkan pelaporan kegiatan perpustakaan ke pusat secara online.

Upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam mengatasi kendala tersebut.

A. Melakukan kerjasama

Kerjasama pada intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih yang saling menguntungkan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang menjalin kerja sama dengan Komisi I DPRD Kabupaten Enrekang. Dispusitaka Enrekang juga melakukan kerjasama dengan

berbagai pihak tingkat provinsi, kabupaten dan swasta. Selain itu transformasi perpustakaan berbasis inklusi ini juga melibatkan Komunitas.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya mengenai kegiatan Stakeholder Meeting merupakan salah satu strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan dukungan dan menjalin kerjasama antarperpustakaan dengan para Stakeholder.

Wawancara dengan Pustakawan Ahli Madya :

“Kerjasama pada dasarnya dilakukan untuk mendapatkan bantuan ataupun dukungan dari pihak lain dengan tujuan bersama yang akan dicapai. Dalam hal ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang melakukan kegiatan Stakeholder Meeting yang dihadiri oleh pihak dari provinsi, kabupaten maupun swasta. Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi antar Stakeholder. (Wawancara dengan Pustakawan Ahli Mady, Pada Rabu, 23 November 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat diketahui bahwa salah satu Upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam mengatasi kendala Tranformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu dengan melakukan kerjasama. Kerjasama yang dilakukan meliputi berbagai pihak dari tingkat provinsi, kabupaten dan swasta.

B. Memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal

Anggaran adalah permasalahan yang sampai saat iniselalu menjadi alasan tidak dapat berkembangnya sebuah perpustakaan. Dengan adanya program prioritas nasional dan pedoman Wawancara dengan Kepala Bidang Pengembangan Minat Baca, penyusunan APBD tahun 2023 diharapkan setiap pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat merencanakan program kegiatan perpustakaan pada tahun 2023.

Berikut penuturan dari Pustkawan Ahli Muda di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang:

“Upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam mengatasi kendala Tranformasi perpustakaan salah satunya yaitu dengan Memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal. Misalnya Ketika ada pendampingan dari pusat untuk berkunjung maka Dinas perpustakaan akan mendampingi semaksimal mungkin.”

Dari hasil wawancara dengan informan diatas diketahui bahwa upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam mengatasi kendala Tranformasi perpustakaan yaitu dengan memanfaatkan anggaran dana seoptimal mungkin, karena keterbatasan dana yang diberikan oleh pusat.

Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam mengembangkan perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dari provinsi, kabupaten maupun swasta. Serta memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja pustakawan dalam program ini dapat dikatakan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari terlaksananya implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang saat ini menjadi prioritas nasional dalam mendorong kegiatan literasi yang memberdayakan. Kinerja ini dapat dilihat dari adanya keaktifan para pustakawan dalam memfasilitasi masyarakat dengan kegiatan peningkatan keterampilan melalui kegiatan pelibatan masyarakat di perpustakaan. Selain itu, adanya upaya meningkatkan kualitas layanan informasi melalui buku, komputer dan internet juga terlaksana dengan baik. Strategi pustakawan dalam mendorong pengembangan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini agar lebih kuat yaitu ikut serta dalam mendorong terbitnya regulasi/peraturan daerah tentang penyelenggaraan perpustakaan dan gerakan literasi, mengeluarkan regulasi kebijakan dan pembentukan Tim Sinergi, melakukan pertemuan pemangku kepentingan (Stakeholder Meeting), Launcing Eperpus Enrekang, dan melakukan kegiatan advokasi Peer Learning Meeting.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang dalam Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah keterbatasan anggaran dana dan jaringan. Di antara kendala yang dihadapi selama ini yaitu masih belum kuatnya komitmen dan dukungan dari pimpinan terkait program ini, hal ini dapat dilihat dari belum menjadinya fokus dan perhatian khusus terhadap transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, mulai dari alur kegiatan sosialisasi, bimtek, mentoring formal dan mentoring informal, stakeholder meeting, dan money belum dilaksanakan secara konsisten dan belum dimasukkan sebagai bagian dari perencanaan dan penganggaran kegiatan prioritas. Hal lain, sebagai perpustakaan yang sudah sejak awal mengikuti program ini melalui PerpusSeru, ternyata belum mampu mereplikasi secara mandiri perpustakaan di Enrekang. Kendala ini terjadi karena belum adanya soliditas atau komitmen kelembagaan terhadap upaya advokasi dan keberlanjutan program. Kendala lain yaitu belum maksimalnya pelibatan komunitas atau jalinan kemitraan dengan berbagai stakeholder terkait bagaimana membangun ekosistem literasi.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Enrekang Kabupaten Enrekang dalam mengatasi kendala-kendala Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yaitu Upaya yang hendaknya dilakukan agar dapat mengatasi masalah tersebut yaitu menguatkan komitmen pimpinan terhadap transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagai gerakan literasi yang harus dikerjakan secara mengakar dan berkelanjutan. Memasukkan kegiatan-kegiatan pada alur program dalam perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya, apalagi hal itu sudah adalah dalam nomenklatur. Sehingga berbicara mengenai dasarnya, sudah sangat kuat, tinggal bagaimana pimpinan dapat memanager sumber daya agar memaksimalkan strategi dalam mengimplementasikan Transformasi perpustakaan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak baik dari provinsi, kabupaten maupun swasta serta

memanfaatkan anggaran yang ada secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Atikah, Syamsi. (2016). Penguatan Literasi Informasi Berbasis Perpustakaan Bagi Peningkatan Mutu Akademik Mahasiswa Pgmi Iain Cirebon *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar* Vol.2, No. 2.
- Basuki, Sulistyو. (2013). *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta. Gramedia.
- Cholid, Narbuko., Dan Achmadi, Abu. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Darmayanti, Riska. (2016). *Membangun Budaya Literasi Informasi Bagi Masyarakat Kampus (Jurnal Iqra' Vol 10 No.01)*.
- Dian, Sinaga. (2014). *Perpustakaan Umum Di Indonesia Sebagai Agen Perubahan Sosial* *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol. 6, No. 1.
- Firman, A., Mansyur, M., Latief, F., Nurhaeda, Z., Hidayat, A. R. F., & Baharuddin, I. (2023). *MEMBANGUN LITERASI KEWIRAUSAHAAN BAGI GENERASI MUDA*. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(1), 574-582.
- Hartati, Mega, Nur., and Achmad, Kuncoro. (2014). *Analisis Strategi Bisnis Pada PT Abadi Samudera Indonesia Undergraduate Thesis*, Binus.
- Hartono. (2017). *Strategi Tranformasi Perpustakaan Digital Dalam Membangun Akseibilitas Informasi* *Jurnal Perpustakaan* Vol.8No.1.
- Jaka, Warsihna. (2016). *Meningkatkan Literasi Membaca Dan Menulis Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, *Jurnal Kwangsan*, Vol. 4 No. 2, Edisi Desember 2016.
- Moleong, Lexy, J. (2016). *Metedologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya *Libraries For All: Social Inclusion In Public Libraries Policy Guidance For Local Authorities In England October 1999 (Departemen For Culture, Media And Sport, Gov. Uk)*.
- Muhammad, Usman, Noor. (2019). “Aplikasi Layanan Informasi Berbasis Internet Untuk Menumbuhkaninklusi Sosial Di Perpustakaan Daerah”*Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi* Vol. 4 No.1.
- Muri, Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta. Kencana.
- Purnomo. (2018). *Peranan Perpustakaan Umum Dalam Gerakan Literasi Informasi Sebagai Sarana Pembelajaran Sepanjang Hayat*.

Rani, Auliawati, Rahman. (2019). Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Membaca Malang. (Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjajaran).

Riki, Arianto. (2019). Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Dan Sdgs.

Sugiono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung. Alfabeta.

Suharyanto, Malawa. (2019). Model Dan Konsep Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Di Era Digital, (Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia).

Thamrin, Husni. (2016). Proses Inklusi Sosial Anak Jalanan Dampungan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan Kksp (Repositori Institusi Usu).

Undang-Undang No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Wahdaniah, Nurul. (2016). Strategi Perpustakaan Dalam Meningkatkan Minat Kunjung Siswa di Sma Negeri 13 Makassar. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Wiji, Suwarno. (2014). Dasar-Dasar Ilmu Perpustakaan:Sebuah Pendekatan Praktis. Jogjakarta. Ar-RuzzMedia.